

DAFTAR PUSTAKA

- Adzani, A. H., & Martani, D. (2014). Pengaruh Kesejahteraan Masyarakat, Faktor Politik, dan Ketidakpatuhan Regulasi terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Akhmad Hafidzan Adzani dan Dwi Martani. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVII, Mataram, Nusa Tenggara Barat, 24-27 September 2014*.
- Akbar, B., Djanegara, M. S., Djazuli, A., Pamungkas, B., & Mulyani, S. (2016). *Factors Affecting the Probability of Local Government Financial Statement to Get Unqualified Opinion. Journal The IAFOR International Conference on the Social Science*.
- Alfiani, A. N., Rahayu, S., & Nurbaiti, A. (2017). Jumlah Temuan Audit atas Sistem Pengendalian Intern dan Jumlah Temuan Audit atas Kepatuhan Terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 9(1), 12–18.
- Agusti, A. F., Rossieta, H., & Siswantoro, D. Faktor Determinan Akuntabilitas dan Transparansi Kementerian/Lembaga. *Jurnal Akuntansi Universitas Indonesia*.
- Amyulianthy, R., Anto, A. S. U., & Budi, S. (2020). Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Opini Audit (Studi Pada Pemerintah Provinsi di Indonesia). *Jurnal Penelitian Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Pancasila*, 1(1), 14–27.
- Anissatul, L., Aris, E., & Saptantinah, D. (2018). *Analysis of Factors that Affect the Opinion of the BPK Regional Financial Government Report in Indonesia. The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science (The 2nd ICTESS 2018), E-Journal Slamet Riyadi University*, 395–410.
- Atmaja, R. S. A., & Probohudono, A. N. (2015). Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI, Temuan Ketidakpatuhan dan Kerugian Negara. *Jurnal Anti Korupsi: INTEGRITAS*, 1(1), 81–110.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2020). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (IHPS I) Tahun 2019*.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). (2020). *Daftar Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2019*.
- Boswell, M. (2015). *Giving Effect to Quality Audit Recommendations: A Case Study From An Organisational Culture Perspective. Journal of Higher Education Policy and Management*, 37(5), 572–585.

- CPA Australia Ltd. (2012). *A Guide to Understanding Auditing and Assurance*. Australia.
- Dr. Hoesada, J. (2020). *Teori Keagenan*.
- Erniati. (2019). *Laporan Keuangan Pemerintah sebagai Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara*. Artikel. 6 September 2019. (<http://djpbk.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2836-laporan-keuangan-pemerintah-sebagai-wujud-akuntabilitas-keuangan-negara.html>).
- Fatimah, D., Sari, R. N., & Rasuli, M. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Opini Audit Tahun Sebelumnya dan Umur Pemerintah Daerah terhadap Penerimaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau*, 3(1), 1–15.
- Harahap, M. S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi. *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatera Utara*, 1–94.
- Herlinawati, M. (2019). *Sidang Tahunan MPR, Jokowi: Tata Kelola Pemerintahan Keuangan Akuntabel terus Diupayakan*. Artikel. 16 Agustus. (<http://www.antarane.ws.com/berita/1014022/jokowi-tata-kelola-pemerintahan-keuangan-akuntabel-terus-diupayakan.html>).
- HM Treasury. (2012). *Fraud and The Government Internal Auditor*. January. United Kingdom.
- International Standard on Auditing 250 (ISA 250) Revised. Consideration of Laws and Regulations in an Audit of Financial Statements. Effective for periods beginning on or after December 15, 2017. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.
- International Standard on Auditing 315 (ISA 315) Revised. Identifying and Assessing the Risks of Material Misstatement. Effective for periods beginning on or after December 15, 2020. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.
- International Standard on Auditing 700 (ISA 700) Revised. Forming an Opinion and Reporting on Financial Statements. Effective for periods ending on or after December 15, 2016. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)*.
- Kusumawati, D., & Ratmono, D. (2017). Determinan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(1), 1–15.

- Liu, J., & Lin, B. (2012). *Government Auditing and Corruption Control: Evidence From China's Provincial Panel Data*. *China Journal of Accounting Research*, 5(2), 163–186.
- Lu, B. (2020). *Literature Review of Audit Opinion*. *Modern Economy*, 11(1), School of Management, Jinan University, Guangzhou, China, 28–36.
- Maabuat, J. S., Morasa, J., & Saerang, D. P. E. (2016). Pengaruh Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-Undangan dan Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Opini Bpk-Ri atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. *E-Journal Universitas Sam Ratulangi*, 5(2), 52–62.
- Mahpriansyah. (2016). *The Effect of Audit Follow-Up and Sizes on The Audit Quality*. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(2), 195–211.
- Masyitoh, R. D., Wardhani, R., & Setyaningrum, D. (2015). Pengaruh Opini Audit , Temuan Audit , dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun. *Simposium Nasional Akuntansi, XVII*, 1–26.
- Mcclain, J. E., Powell-hodge, M., & Beck, R. (2018). *Audit Findings, Now What?. The Journal of The American Society of Military Comptrollers*, 26–30.
- Pamungkas, B., Ibtida, R., & Avrian, C. (2018). *Factors Influencing Audit Opinion of The Indonesian Municipal Governments' Financial Statements*. *Cogent Business and Management*, 5(1), 1–18.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. 6 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6010. Jakarta.
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017. Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. 6 Januari 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6011. Jakarta.
- Peraturan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018. Tata Cara Penyampaian dan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 2 Oktober 2018. Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006. Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 3 April 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 28 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2014. Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja. 27 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339. Jakarta.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017. Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. 6 Maret 2017. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 39. Jakarta.
- Rahayu, F. I. S., & Fidiana, F. (2018). Derterminan Kualitas Opini Audit Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 267–279.
- Rosadi, S., Siyamto, Y., & Nur Aisyiah, H. (2017). Pengaruh Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan, Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan, Status Daerah, dan Ukuran Daerah terhadap Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(2), 99–111.
- Sari Adelia et al. (2016). Pengaruh Temuan Audit, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Opini Audit melalui Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. *Jurnal Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 9(1), 33–46.
- Siregar, M. I., & Rudiansyah, J. (2019). Pengaruh Jumlah Temuan Audit terhadap Opini Audit Kabupaten/Kota Se-Sumatera. *Jurnal Ecoment Global*, 4(1), 101–124.
- Syahputra, T., Hasan, A., & Rasuli. (2019). Pengaruh Pengungkapan Kinerja Keuangan Pemerintah, Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Opini Audit dengan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi*, 27(2), 112–123.

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia Pasal 23 Ayat 5. Hal Keuangan.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia Pasal 23E. Perubahan Ketiga. Badan Pemeriksa Keuangan. 9 November 2001. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Keuangan Negara. 5 April 2003. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 19 Juli 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. Badan Pemeriksa Keuangan. 30 Oktober 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654. Jakarta.
- Wulandari, I., & Bandi, B. (2015). Pengaruh E-Government, Kapabilitas Apip dan Persentasi Penyelesaian Tindak Lanjut terhadap Opini Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 15(2), 148–157.
- Xiao, J. Z., Yang, S., Zhang, X., & Firth, M. (2016). *Institutional Arrangements and Government Audit Independence in China*. *Abacus*, 52(3), 532–567.
- Yunanti, S. (2016). Analisis Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 5(1), 63–70.